

LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2016
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SAMBUT PRESIDEN DI PERTUNJUKAN RAKYAT SAIL KARIMATA 2016

Masyarakat menyambut meriah kedatangan Presiden Joko Widodo saat menyambangi Pertunjukan Rakyat yang digelar Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo di arena Pasar Malam Pelataran Pantai Pulau Datok, Kabupaten Kayong Utara, Jumat 14 Oktober 2016.

Ketika tengah berjalan menuju tempat yang telah disediakan, ratusan warga yang telah memadati pasar malam tersebut, berteriak memanggil nama Presiden dan tidak sedikit yang meminta berfoto bersama.

Foto: KSP





**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2016**

Pengarah:

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Editor:

Sumiati

Penulis:

Prasetyo Hadi
Perdamen Sinuraya
Lukman Hakim

Grafis:

Alfi Sahrin
Supriyanto

Diterbitkan oleh:

**Bagian Penyusunan Progam & Pelaporan Setditjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Tahun 2017**

DAFTAR ISI



BAB I	PENDAHULUAN	7
	Latar Belakang	7
	Organisasi	8
	Aspek Sinergis Organisasi dan Permasalahan Utama	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
	RPJMN 2015 – 2019	14
	Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	15
	Perjanjian Kinerja	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	Capaian Renstra 2016	22
	Kinerja Eselon I Tahun 2016	24
	Kinerja Eselon II Tahun 2016	36
	Kinerja Direktorat Komunikasi Publik	36
	Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	37
	Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik	38
	Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi	39
	Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional	40
	Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	41
BAB IV	PENUTUP	42
	Kesimpulan	42
	Saran	43
	Lampiran Realisasi Keuangan 2016	45

Daftar Tabel

Tabel 1. Pengelompokan Tantangan Utama Pembangunan	5
Tabel 2. Perbedaan Karakteristik Alur Penyampaian Informasi	12
Tabel 3. Perubahan Sasaran dan Indikator Renstra Kemkominfo 2015-2019	17
Tabel 4. Perjanjian Kinerja di Lingkup Kemenkominfo	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja DJIKP Berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemkominfo 2015-2019	21
Tabel 6. Capaian Hasil Survey Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah	22
Tabel 7. Sasaran 1	24
Tabel 8. Sasaran 2	26
Tabel 9. Sasaran 3	30
Tabel 10. Sasaran 4	32
Tabel 11. Sasaran 5	32
Tabel 12. Sasaran 6	34
Tabel 13. Data PPID	34
Tabel 14. Sasaran 7	35
Tabel 15. Capaian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik	36
Tabel 16. Capaian Kinerja Direktorat Pengolahan & Penyediaan Informasi	37
Tabel 17. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik	38
Tabel 18. Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi	39
Tabel 19. Capaian Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional	40
Tabel 20. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	41
Tabel 21. Lampiran Laporan Realisasi Keuangan 2016	45

Daftar Diagram

Diagram 1. Organisasi Kemenkominfo	9
Diagram 2. Organisasi Ditjen IKP	10
Diagram 3. Arah Pembangunan dan Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2019	13
Diagram 4. Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan Nawacita dan Agenda Pembangunan Nasional	16
Diagram 5. Korelasi Pengukuran Capaian IKU dan IKK di Lingkup Ditjen IKP	42

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional berdasarkan Nawacita adalah meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) memiliki fungsi sebagai komunikator Pemerintah. Fungsi ini diturunkan dari UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian Direktorat Jendral (Ditjen) IKP berperan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa mendapatkan akses terhadap informasi publik.



Berdasarkan Survey Indikator TIK Tahun 2016, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi dengan berbagai cara. Sebagian besar mendapatkan informasi melalui media televisi (95%). Selain itu, melalui internet (33%), radio (20%), koran (12%), dan media lainnya (22%). Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar dari mereka memiliki akses terhadap televisi (89%) dan telepon selular (66%), namun demikian, televisi dan telepon selular yang mereka miliki tidak dapat mengakses informasi mengenai program prioritas pemerintah terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya dibutuhkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. Pemerintah menunjuk Kemkominfo, dalam hal ini Ditjen IKP untuk:

- Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;
- Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
- Melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;
- Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
- Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;

- Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres No. 9 Tahun 2015 ini, Ditjen IKP diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (Government Public Relation “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda setting akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen IKP Kemenkominfo) bertekad untuk (1) memberikan layanan informasi yang mengedukasi, memberdayakan, dan mencerahkan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan (2) menjamin terselenggaranya komunikasi publik yang lancar dan demokratis.

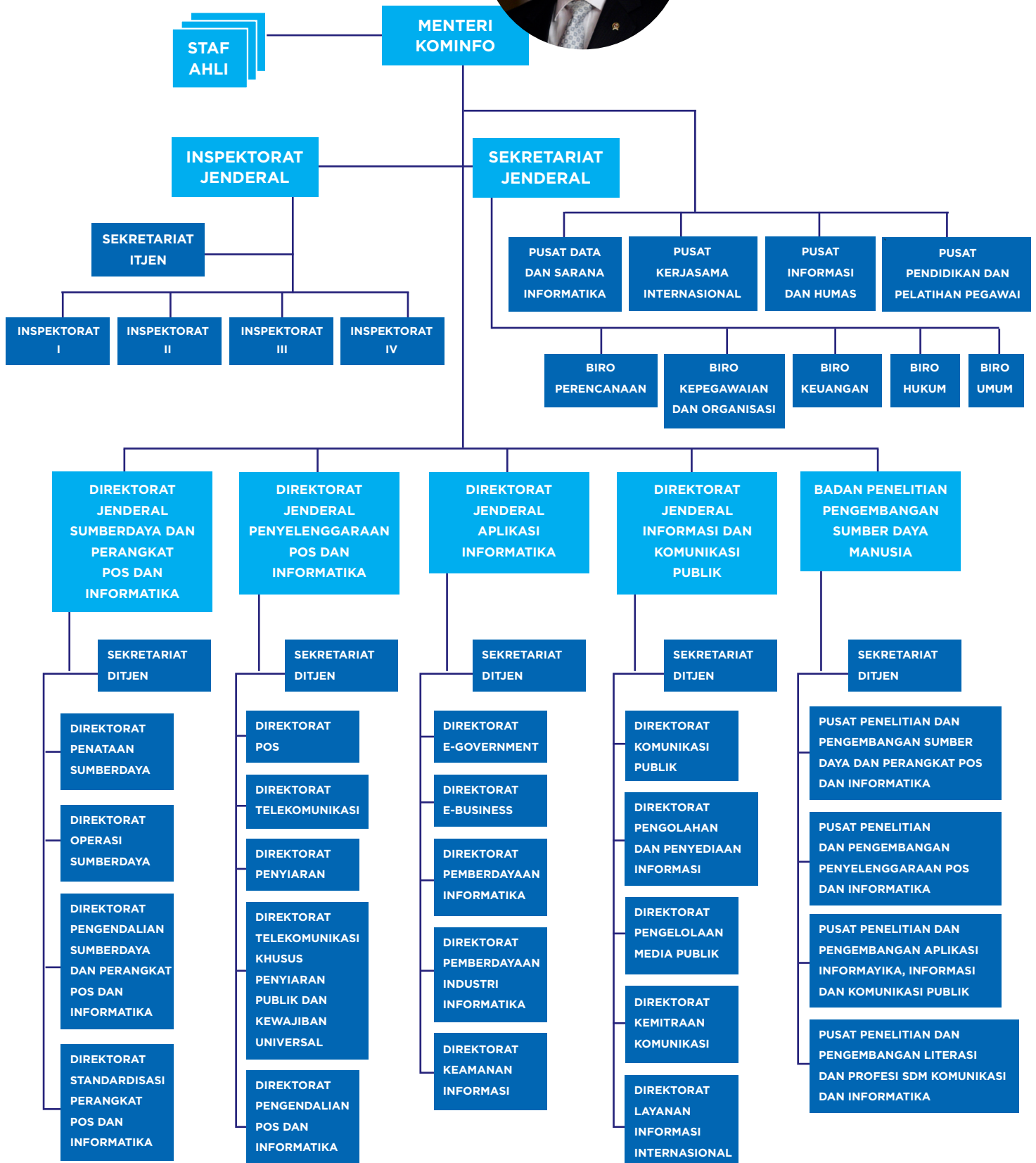
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen IKP. Kinerja pemerintah yang akuntabel merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Organisasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu, fungsi Kemenkominfo adalah:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

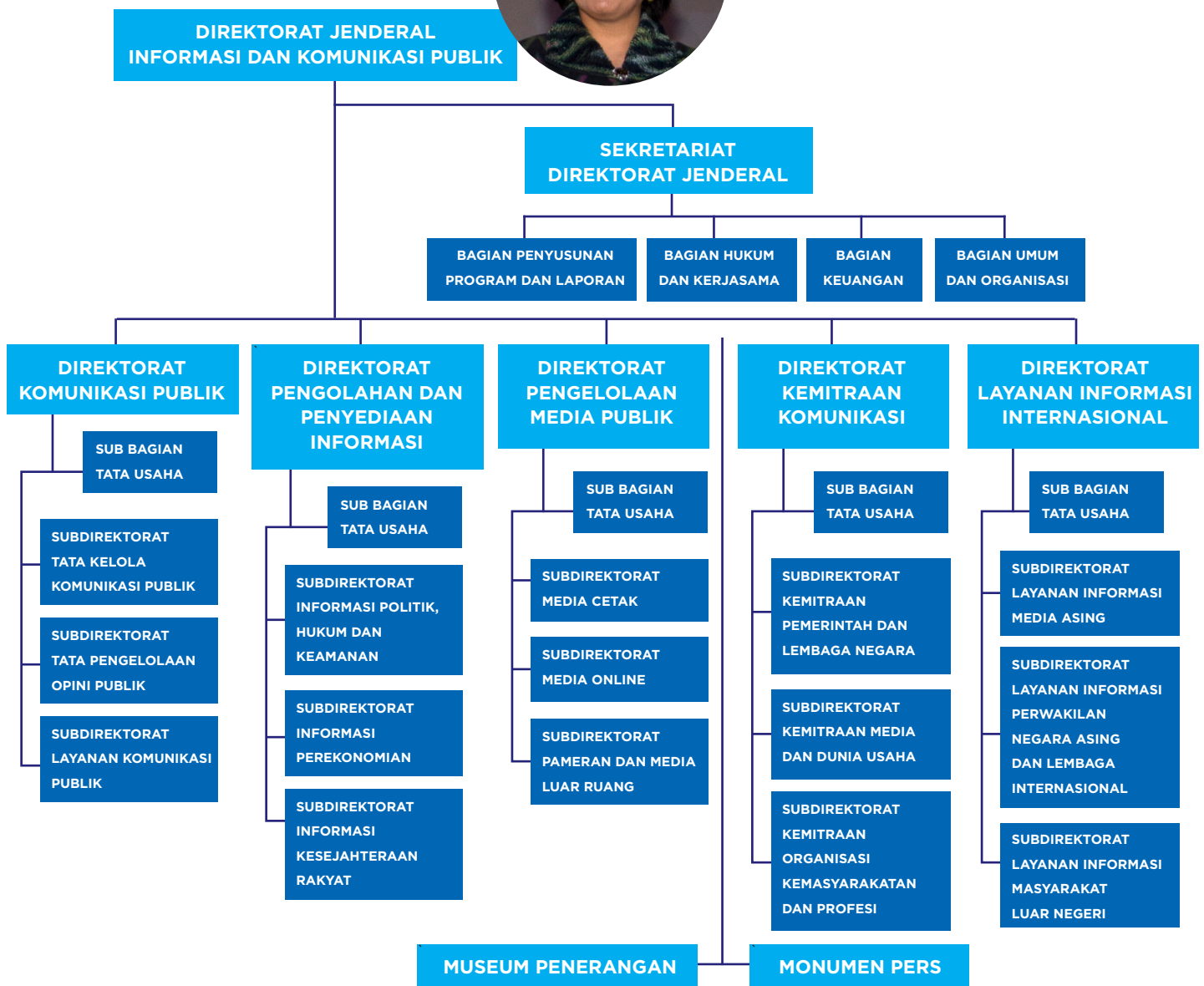
Diagram 1.
Organisasi Kemenkominfo



Ditjen IKP sebagai salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan seluruh kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah. Sementara itu, fungsi Ditjen IKP adalah:

- Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat
- Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Diagram 2.
Organisasi Ditjen IKP



Aspek Sinergis Organisasi dan Permasalahan Utama

Bangsa Indonesia dihadapkan kepada tiga masalah pokok dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Permasalahan pokok tersebut mencakup berbagai kendala dalam pembangunan komunikasi dan informatika tanah air.

Tabel 1.
Pengelompokan Tantangan Utama Pembangunan

No.	Upaya	Tantangan Utama	Tantangan di bidang Komunikasi dan Informatika
1.	Dalam rangka meningkatkan wibawa negara	Tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Government Public Relations (GPR) belum berjalan optimal • Sebagian besar Badan Publik belum mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pemberitaan media massa kurang berimbang yang cenderung menyudutkan pemerintah • Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers belum terukur (saat ini dipercayakan kepada Perum LKBN Antara) • Masih berkembangnya budaya korupsi ditandai dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di urutan 117 dari 175 negara pada tahun 2015¹
2.	Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa	Tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan	Masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan terpencil belum mampu memanfaatkan Layanan Informasi dan Komunikasi yang mendidik (<i>educative</i>), mencerahkan (<i>enlightening</i>), dan memberdayakan (<i>empowering</i>) masyarakat dalam Kerangka NKRI (<i>nationalism</i>)
3.	Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi	Tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berperan dan berfungsinya Pejabat Fungsional Pranata Humas • Situasi politik yang “memanas” menjelang pelaksanaan Pemillukada Serentak akhir 2015

Disamping itu dalam menghadapi tantangan di bidang komunikasi dan informatika, ada kondisi obyektif yang kurang menguntungkan yakni:

- Kebijakan Otonomi Daerah di era Reformasi membawa dampak "terputusnya" komunikasi antara pusat dengan daerah
- Akses masyarakat terhadap informasi publik belum merata sehingga menghambat pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.
- Kebijakan Otonomi Daerah (desentralisasi) setelah kehadiran Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah dibanding masa Orde Baru yang sentralistik. Karakteristik alur penyampaian informasi setelah era reformasi berubah drastis dibanding era Orde Baru.

Tabel 2.
Perbedaan Karakteristik Alur Penyampaian Informasi

	Era Orde Baru yang Sentralistik	Era Reformasi yang Desentralistik
Karakteristik Penyampaian Informasi Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen Penerangan (Deppen) merupakan leading sector penyampaian informasi • Deppen sebagai Juru Bicara Pemerintah • Menteri Penerangan memberikan keterangan pers sesuai Sidang Kabinet 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwenang sebagai sumber informasi • Kemenkominfo bermitra dengan kementerian lain dalam penyampaian informasi • Menkominfo memfasilitasi penyampaian informasi
Karakteristik Media Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • RRI dan TVRI menjadi media pemerintah • Siaran sentral mudah • RRI dan TVRI mudah untuk meminta radio dan TV swasta untuk relay siaran • Nuansa pembinaan terhadap keberadaan media 	<ul style="list-style-type: none"> • RRI dan TVRI independen dalam pelaksanaan siaran • Kemenkominfo menjadi fasilitator siaran kebijakan pemerintah • Kemenkominfo menyediakan dana untuk siaran • Nuansa pemberdayaan dan bermitra dengan media

Untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus merupakan gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan komunikasi dan informatika di semua daerah, termasuk di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Dengan demikian pembangunan komunikasi dan informatika oleh Ditjen IKP secara garis besar ditujukan untuk:

- Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing; dan
- Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sistem perencanaan yang baik akan mendorong keberhasilan pemerintah mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagaimana gambar dibawah ini:

Diagram 3.
Arah Pembangunan dan Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2024



Sebagai pengejawantahan RPJPN 2005-2024, Ditjen IKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel berpedoman kepada dokumen perencanaan, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek, yang meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019
- Penetapan Kinerja Ditjen IKP Tahun 2016

RPJMN 2015-2019

Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2024, RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Penyusunan RPJMN 2015-2019 sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan Konstitusi UUD 1945 dan RPJPN 2005-2024.

Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Berkaitan dengan ini telah diterapkan Visi **Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019** adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui **7 Misi Pembangunan** yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan Agenda Prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam periode 2015-2019 diprioritaskan kepada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019, Kemenkominfo menggulirkan koridor penyusunan program kerja terpilih untuk Renstra 2015-2019. Koridor penyusunan Renstra 2015-2019 dibatasi oleh janji Trisakti dan Nawa Cita.

Visi Kemenkominfo untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yakni **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kemenkominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemenkominfo diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK

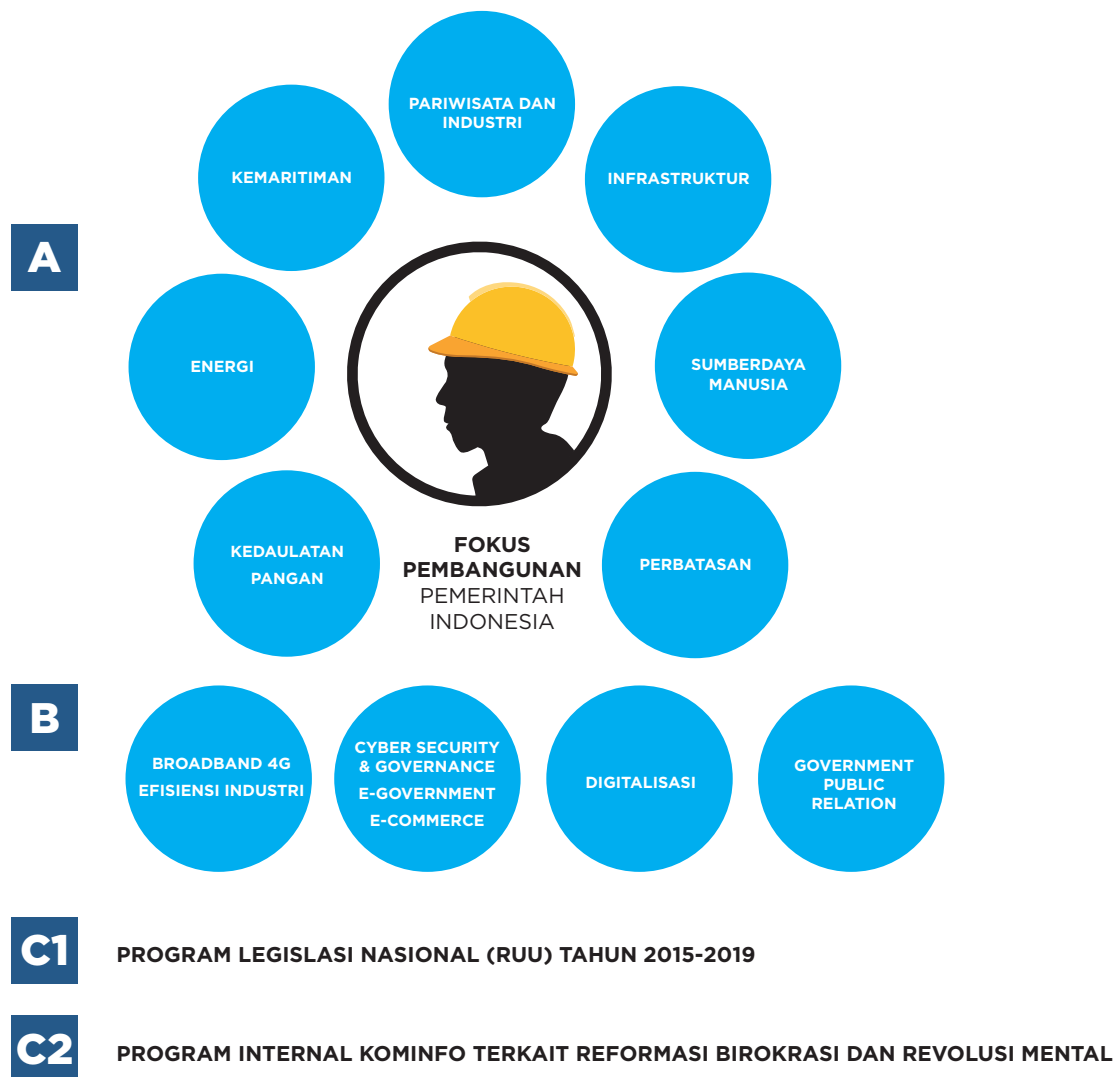
Sementara itu, **tujuan Kemenkominfo** antara lain:

- Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Adapun **Sasaran Strategis Pembangunan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019** disusun dengan 4 fokus utama yakni:

1. Kemenkominfo sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kemenkominfo sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kemenkominfo sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kemenkominfo sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Diagram 4. Program Utama Kemenkominfo
Berdasarkan Nawacita dan Agenda Pembangunan Nasional



Tahun 2016 menjadi tahun kedua bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, yang kemudian direviu dan disusun perubahannya dengan turut mengadopsi tantangan dan masalah strategis terkini. Perubahan atas Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 akhirnya ditetapkan tanggal 2 Desember 2016, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 antara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3. PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA 2015 - 2019
SEBELUM DAN SESUDAH REVISI**

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan		SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	
IKSS.1	Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	IKSS.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)
IKSS. 2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	IKSS.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)
IKSS. 3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar, terpencil)	IKSS.3	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa) Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa
IKSS.4	Jumlah penyediaan akses pitalebar internet	IKSS.4	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan) Total kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No.1/2015= 187 lokasi prioritas

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.5	Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar nasional	IKSS.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita
	IKSS.7	IKSS.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO)
	IKSS.8		
	IKSS.9		
	IKSS.10	Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013: 28,7 Juta)	
	IKSS.11	Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta)	
	IKSS.12	Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital ((Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa)	
		Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa	
		Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa	
		Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK	
		Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK	
		Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK	
SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan		SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasa- ran Strategis (IKSS)	
IKSS.1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pitalebar	IKSS.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)
IKSS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring		
IKSS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital (
IKSS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)		
IKSS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo		
IKSS.6	Persentase (%) penetapan dan impelementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE		
IKSS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government Nasional		
IKSS.8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional		
IKSS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)		
SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman		SS. 3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif	
IKSS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	IKSS.1	Opini laporan keuangan
IKSS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief Information Officer (NCIO)	IKSS.2	Indeks Reformasi Birokrasi
IKSS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	IKSS.3	Nilai akuntabilitas kinerja
IKSS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik		
IKSS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi Government Publik Relations (GPR)		
IKSS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental		
SS. 4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien		-	

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan Digitalisasi Penyiaran)	-	-
IKSS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda		
IKSS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo		
IKSS.4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas		
IKSS.5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS.6	Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo		
IKSS.7	Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change Management		
IKSS.9	Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan		

Perjanjian Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja di lingkup Kemenkominfo merujuk kepada RPJMN 2015-2019 dan perintah (direktif) Presiden RI yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Kedua rujukan tersebut di lingkup Kemenkominfo diterjemahkan ke dalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019. Di level Unit Kerja Eselon I, Rencana Kerja dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemkominfo 2015-2019.

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja di Lingkup Kemenkominfo

No.	Perjanjian Kinerja Eselon I	Perjanjian Kinerja Eselon II
1.	Mendorong pencapaian RPJMN sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019	Mendukung secara sinergi seluruh pencapaian Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I
2.	Mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia	

Ditjen IKP sebagai salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo memiliki beragam target yang perlu dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen IKP berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemkominfo 2015-2019.

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemkominfo 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik	Persentase (%) Pemda (Prov/Kab/Kota) yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi	70%
		Persentase (%) produksi konten berbasis edukasi yang dilaksanakan oleh Kemkominfo	100%
		Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi	30%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Persentase (%) akses masyarakat terhadap media publik	90%
		Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis	75%
3.	Meningkatnya Partisipasi publik dan citra positif pemerintah	Persentase (%) Badan Publik Negara yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	35%
		SOP GPR sebagai dapur komunikasi Pemerintah	1 Dok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan upaya mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kinerja pemerintah yang akuntabel pada gilirannya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaporan Kinerja pada hakikatnya perlu selaras dengan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis. Oleh karena itu, realisasi kinerja dari suatu instansi seyogianya selaras dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga.

Capaian Renstra Kemkominfo yang didukung oleh capaian kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2016

Sebagai Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan fungsi pengelolaan komunikasi publik sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tugas tersebut melalui program dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Sasaran Strategis nomor 2 Renstra Kemkominfo yakni Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang mempunyai target Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik).

Hasil survei yang digunakan merujuk pada lembaga survei internasional yang dapat dijamin kredibilitas dan validitas hasilnya. Oleh karena itu, pengukuran pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan hasil survey Edelman Trust Barometer Tahun 2017¹. Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan data bahwa terjadi kenaikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun capaian indikator ini tergambar seperti berikut:

Tabel 6.
CAPAIAN HASIL SURVEY KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH

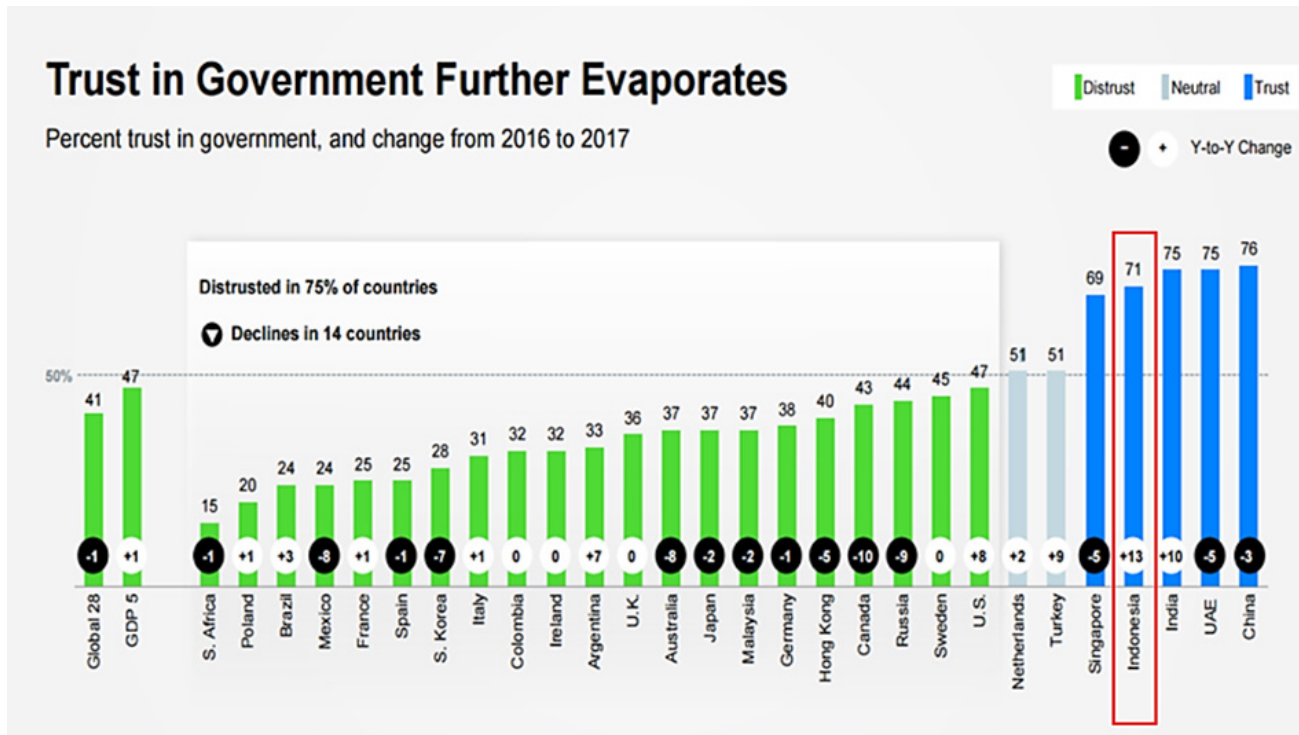
Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Hasil Survey Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	%	60%	71%	118,33%

Hasil survei menunjukkan bahwa 71% masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah, hasil tersebut naik sebesar 13% dari hasil survei tahun lalu (2016 = 58%). Dengan capaian indeks diatas 60%, menempatkan Indonesia di jajaran negara-negara “Trusters”. Kebijakan populis seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur berhasil merebut simpati publik. Sampel diambil dari 1.150 responden dengan usia diatas 18 tahun melalui metode jajak pendapat online/daring.

1

<http://www.edelman.com/post/the-enigma-of-indonesia/>

Diagram 5.
HASIL SURVEI EDELMAN TRUST BAROMETER TENTANG
TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH²



Source: 2017 Edelman Trust Barometer Q11-620. [TRACKING] [GOVERNMENT IN GENERAL] Below is a list of institutions. For each one, please indicate how much you trust that institution to do what is right using a nine-point scale where one means that you "do not trust them at all" and nine means that you "trust them a great deal." (Top 4 Box, Trust) General Population, 28-country global total.

GDP 5 = U.S., China, Japan, Germany, U.K.

Hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah. Dengan semakin besarnya pengetahuan public, maka akan makin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu peran Government Public Relation dalam mendiseminasikan informasi tentang program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah sangat krusial.

Kinerja Eselon I Tahun 2015

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja Ditjen IKP merujuk kepada Perjanjian Kinerja Dirjen IKP yang terdiri dari Perjanjian Kinerja RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemkominfo 2015-2019 yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
1	Persentase (%) Pemda (Prov/Kab/Kota) yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi	70% (384 dari total 548 Prov/Kab/Ko)	384 dari total 548 PEMDA (Prov/Kab/Kota) telah bersinergi dengan Ditjen IKP dalam rangka penyebaran konten informasi publik. Hal ini dicapai melalui reproduksi informasi publik oleh 150 website pemda dan 200 media center, serta penyebaran ulang bahan informasi tercetak oleh setidaknya 100 Prov/Kab/Kota	392 dari total target 548 prov/kab/kota Telah disebarkan ulang informasi publik melalui GPR Widget oleh 127 website PEMDA (Prov/Kab/Kota), serta berita/informasi daerah hasil kontribusi 160 Media Center yang di-publish di web infopublik, distribusi bahan informasi tercetak ke 100 Dinas Pemprov/Kab/Ko)

Sesuai tabel diatas, sasaran nomor 1 (satu) adalah Menyelenggara-kan penyebaran konten informasi public sesuai dengan regulasi penyebaran informasi pada 70% Pemda (Prov/Kab/Kota) secara nasional. Target 70% adalah sebanyak 384 Pemda dari total 548 Pemda melaksanakan penyebaran/reproduksi informasi publik. Capaian target ini adalah sebanyak 392 Pemda atau 71,5% telah menyebarkan ulang informasi publik (narasi tunggal) melalui GPR Widget di 127 website Pemda; sebanyak 160 media center daerah berkontribusi mengirim berita yang diupload di web infopublik; dan distribusi informasi tercetak ke 100 Dinas di Pempov/Kab/Ko.

Gambar 1.
Contoh GPR Widget yang terpasang di Web Pemda Cimahi

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

ARTIKEL 23-09-2017 07:14

Hari Maritim, Momentum Jadikan Indonesia Mercusuar Dunia
Tim GPR Kominfo

ARTIKEL 19-09-2017 11:02

Badan POM Perangi Penyalahgunaan Obat dan Obat Ilegal
Tim GPR Kominfo

ARTIKEL 19-09-2017 10:47

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga
Tim GPR Kominfo

ARTIKEL 09-09-2017 14:59

Perayaan HAORNAS 2017, Momentum Mengembalikan Kejayaan Prestasi Olahraga Nasional
Tim GPR Kominfo

ARTIKEL 08-09-2017 15:27

Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan
Tim GPR Kominfo

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Widget GPR

Gambar 2.
Contoh Berita Media Center Daerah di laman www.infopublik.id



Tabel 8.
Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
2	Persentase (%) produksi konten berbasis edukasi yang dilaksanakan oleh Kem-kominfo	100% (baseline 2015: 276, target minimal 2016: 304)	304 produksi konten berbasis edukasi. Dicapai melalui produksi konten Digital (200 infografis, 12 ebook), Video (3 Dokumenter), Tercetak (15 buku, 12 Tabloid, 3 Jurnal, 6 Fol, 1 Handbook, 4 Warta Bakohumas, 48 Konten GPR Report), Advertorial/Placement di Media Cetak (10), reproduksi informasi lewat Twitter, Facebook, Instagram	489 Konten Informasi & Publikasi seperti Infografis, Videografis, Buku, Jurnal Dialog, Advertorial, 2 Fol Dicapai melalui reproduksi informasi lewat Twitter 18,5 juta, Facebook 4.078.849, Instagram 231.848 Hasil Reputasi Pemerintah terus meningkat terbukti dengan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap citra Pemerintah melalui Kompas : 66,5 %, SMRC : 72%, CSIS : 66%, sedangkan citra Presiden menurut Kompas : 81%, SMRC : 80%, CSIS : 85%"

Capaian sasaran nomor 2 (dua) yakni Menyelenggarakan 100% produksi konten berbasis edukasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo adalah sebesar 115 % (dengan baseline target adalah 304). Produksi konten selama tahun 2016 sebagai berikut:

INFOGRAFIS	: 234
VIDEOGRAFIS	: 213
BUKU TERCETAK	: 15 JUDUL
TABLOID KOMUNIKA	: 12 EDISI
JURNAL DIALOG	: 3 EDISI
ADVERTORIAL	: 10 JUDUL
MAJALAH FOI	: 2 EDISI
TOTAL	: 489



Infografis



Videografis

Selain itu, produk digital berupa infografis dan videografis tersebut diatas direproduksi dan disebarakan melalui kanal media sosial dengan sebaran jangkauan sebagai berikut:

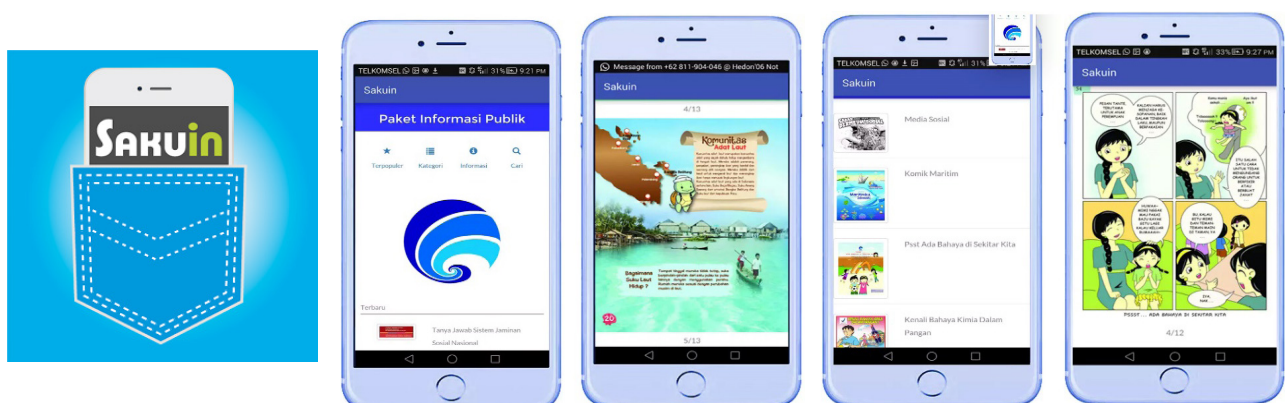
Twitter : 18.500.000 reach
Facebook : 4.078.849 reach
Instagram : 231.848 reach

Dengan produksi dan diseminasi konten yang berbasis edukasi yang beragam melalui berbagai kanal tersebut, Kementerian Kominfo berkontribusi dalam peningkatan citra positif pemerintah yang ditandai dengan hasil survey tentang tingkat kepercayaan public terhadap kinerja pemerintah seperti yang tergambar pada capaian Renstra Kemkominfo tahun 2016.

Gambar 3.
Screenshoot Twitter @djikp yang menyebarkan produksi konten infografis melalui media sosial



Gambar 4.
Screenshoot aplikasi sakuin.kominfo.go.id yang menyebarkan produksi konten positif



Tabel 9.
Sasaran 3

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
3	Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi	30% (1500 orang dari 4700 orang)	Penyebaran informasi melalui forum tatap muka dengan target audience di 2016 sebanyak 4700 orang (Forum Dialog Tatap Muka)	Tercapai audience sebanyak 4775 orang (23 Forum Dialog Tatap Muka). Dari 23 forum tersebut sebanyak 3450 peserta atau 73% (dari target total awal 4700) paham/meningkat pemahamannya terhadap isu/tema yang disampaikan pada forum tersebut (hasil kuesioner)

Capaian sasaran nomor 3 (tiga) yakni Menyelenggarakan penyebaran informasi strategis dalam rangka meningkatkan pemahaman/sadar informasi dengan target 30% sasaran khalayak, tercapai sebesar 73% atau melebihi target. Capaian tersebut terpenuhi melalui 23 forum dialog tatap muka yang dihadiri 4775 sebanyak 3450 peserta paham/meningkat pemahamannya terhadap isu/tema yang disampaikan pada forum tersebut yang diukur melalui kuesioner yang disebar pada saat acara (pre/post test). Capaian 23 forum tersebut adalah sebagai berikut

- Sosialisasi UU KIP di Surakarta Jumlah Peserta 200 Orang;
- Sosialisasi UU KIP di Jogja Jumlah Peserta 400 Orang;
- Sosialisasi MEA di Batam Jumlah Peserta 200 Orang;
- Forum Edukasi Literasi Media Jumlah Peserta 200 di NTB;
- Forum Diskusi Revolusi Mental di Bandung: 200 orang;
- Forum Diskusi Revolusi Mental Malang Jumlah Peserta 275 orang;
- Dialog Publik Wawasan Kebangsaan di Jambi (200 peserta);
- Nonton Bersama Film Tema Revolusi Mental (200 peserta) di Sleman;
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik “Revolusi Mental Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik” di Universitas Mpu Tantular (100 Peserta);
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik “Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup Yang Lebih Baik” di Universitas Indonesia (100 Peserta)

- 250 peserta dialog Publik dan Launching Buku tentang Cakap Bermedia Sosial di Yogyakarta;
- 200 Peserta Dialog Publik tentang Bahaya Narkoba di Jambi;
- 200 Peserta Dialog publik tentang wawasan Kebangsaan dan Launching Buku tentang Makna Pancasila Bagi generasi Muda di Jayapura;
- 200 Peserta Diskusi public tentang Pangan Jajan Sehat di Jayapura;
- 200 Peserta, Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik “Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup Yang Lebih Baik” di Universitas Islam Negeri Ciputat;
- 200 Peserta Forum Diskusi Publik dengan Wawasan Kebangsaan di Kab Salatiga;
- 200 Peserta Forum Diskusi Publik dengan Wawasan Kebangsaan di Kota Medan;
- 200 Peserta Forum Diskusi Publik dengan Wawasan Kebangsaan di Kab Pati.
- 200 Peserta Dialog Publik RM di Semarang
- 250 Peserta Forum KIP di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat
- 200 Peserta Forum Wawasan Kebangsaan di Unpad Bandung
- 200 Peserta Diskusi publik “Nation Character Building” pada Generasi Muda di Era Globalisasi” di Ambon
- 200 Peserta Diskusi Publik “Pencegahan Radikalisasi Terhadap Ideologi Pancasila” di Kendari

Dengan format diseminasi informasi public berbentuk forum dialog tatap muka tersebut diharapkan para peserta yang meningkat pemahamannya terhadap isu/tema yang diangkat dapat menjadi agen *word of mouth* atau getok tular ke komunitasnya masing-masing.

Gambar 5.
Contoh Pelaksanaan Diskusi Publik oleh Ditjen IKP Kemkominfo

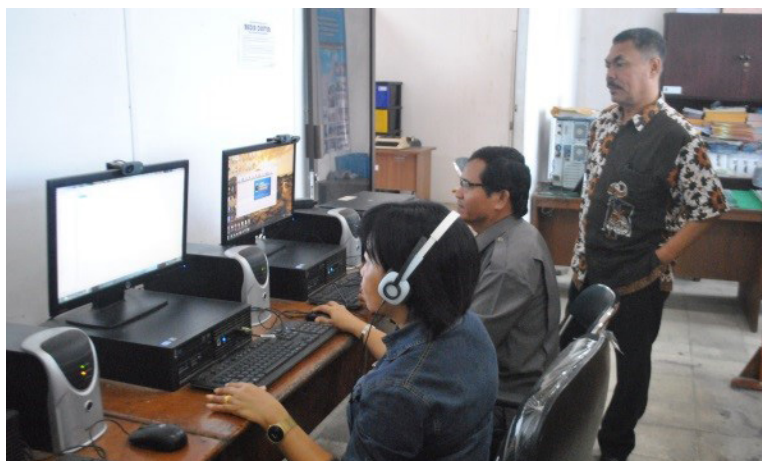


Tabel 10.
Sasaran 4

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
4	Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap informasi melalui Media Publik	90% (157 Media Center aktif))	Dicapai melalui penguatan sarana media center yang dapat diakses oleh publik sebanyak 157 dari 175 media center (pembangunan media center diatas tahun 2011)	160 Media Center Aktif atau 100% dari total 175 media center yang dipantau

Capaian dari sasaran nomor 4 (empat) yakni menyelenggarakan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi melalui media publik yakni sebesar 100% yang dicapai melalui 160 media center yang aktif dari total 175 media center yang dipantau. Keaktifan media center dalam mengirim berita ke laman www.infopublik.id menjadi tolak ukur penilaiannya. Data rangkuman media center yang aktif berkirim berita ada dalam lampiran.

Gambar 5.
Aktivitas Media Center Kab.Karo, Sumatera Utara



Tabel 11.
Sasaran 5

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
5	Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis	75 % (36 dari potensi 50 mitra, efektif dari kerjasama dengan mitra-mitra strategis	Dicapai melalui kerjasama atau kemitraan yg efektif dari setiap direktorat	50 % atau 25 kemitraan yang telah terlaksana dari target 50 kemitraan dengan lembaga/ Media strategis

Capaian sasaran nomor 5 (lima) yakni Menyelenggarakan kemitraan dengan lembaga sosial dan lembaga penyiaran/media yang strategis dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hanya tercapai 48% atau 25 kemitraan yang terjalin dari target awal 36 kemitraan. Berikut daftar kemitraan tersebut:

- Kerjasama pelaksanaan Dialog Interaktif dengan LPP RRI
- Kerjasama pelaksanaan Dialog Interaktif dengan LPP TVRI
- Peran serta aktif dalam AMRI/SOMRI sebagai bentuk kerjasama dengan ASEAN
- Kerjasama sosialisasi anti narkoba dengan BNN
- Kerjasama sosialisasi Sensus Ekonomi dengan BPS
- Kerjasama Literasi Media dengan KPI
- Kerjasama Literasi Media dengan PWI
- Kerjasama Konten Informasi Digital (KIDi) dengan Media Indonesia
- Kerjasama Produksi Konten Literasi Media dengan Fikom UNPAD
- Kerjasama Sosialisasi dengan UIN Sunan Kalijaga
- Kerjasama Sosialisasi dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia
- Kerjasama Sosialisasi dengan Komunitas Blogger Rumah Blogger Indonesia
- Kerjasama Sosialisasi dengan Pramuka
- Kerjasama Sosialisasi Pecahan Rupiah Baru dengan Bank Indonesia Media Indonesia
- Kerjasama Sosialisasi dengan UIN Syarif Hidayatullah
- Kerjasama Sosialisasi dengan Universitas Padjajaran Bandung
- Kerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara Serpong
- Kerjasama dengan Universitas Pancasila
- Kerjasama dengan ITB
- Kerjasama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Kerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya
- Kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta
- Kerjasama dengan Universitas Paramadina Jakarta
- Kerjasama dengan Universitas Komputer Indonesia Bandung
- Kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta

Gambar 5. Aktivitas Dialog Interaktif di LPP RRI



Tabel 12. Sasaran 6

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
6	Persentase (%) Badan Publik Negara yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	35 % (105 Badan Publik) dari 300 Badan Publik	Dicapai melalui perbandingan Badan Publik yang telah menunjuk PPID (300 Badan Publik) sudah melaksanakan KIP sesuai dengan UU dan turunannya (target 105 Badan Publik)	Didrop dan menjadi capaian sasaran Sekretariat KIP

Capaian sasaran nomor 6 (enam) yakni menyelenggarakan pembinaan Badan Publik Negara (K/L) dalam rangka mendorong pembentukan PPID serta pengelolaan PPID dan pelayanan informasi publik, didrop setelah dalam evaluasi Kinerja Semester I diidentifikasi bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan juga oleh Sekretariat KIP. Disepakati kegiatan dimaksud menjadi capaian Sekretariat KIP, sementara Direktorat Komunikasi Publik tidak melanjutkan pemeringkatan Badan Publik yang mengimplementasikan KIP sesuai Undang-undang dan turunannya. Sementara itu Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tetap melaksanakan advokasi pembentukan PPID dengan cara sosialisasi UU KIP dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi perangkat SKPD dan PPID sebagai upaya peningkatan kapasitas personel PPID maupun badan publik dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Berikut daftar PPID yang sudah terbentuk di Indonesia per Februari 2017:

Tabel 13. Data PPID

No	Lembaga	Jumlah	Telah Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persentase (%)	Persentase per kluster
1	Kementerian	34	34	100.00%	51%
2	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP	126	47	37.30%	
3	Provinsi	34	32	94.12%	73%
4	Kabupaten	416	283	68.03%	
5	Kota	98	85	86.73%	
	TOTAL	708	481	67.94%	

Tabel 14. Sasaran 7

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN	CAPAIAN TARGET
7	Merumuskan SOP GPR sebagai dapur komunikasi pemerintah	1 Dokumen SOP GPR	Dicapai melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik	Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik. Sudah mendapatkan izin untuk dilaksanakan uji publik oleh Menteri Kominfo.

Capaian sasaran nomor 7 (tujuh) yakni merumuskan SOP Government Public Relation sebagai dapur komunikasi pemerintah adalah sampai dengan akhir tahun 2016 telah tersusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Tata Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan sudah mendapatkan izin untuk dilaksanakan uji public. Sebagai turunan Inpres No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, RPM ini mempunyai prinsip umum untuk mengatur Instansi Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan Komunikasi Publik, dengan:

- menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri secara berkala;
- menyebarluaskan kepada Publik berupa Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
- menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada Publik secara cepat dan tepat; dan
- menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Kinerja Eselon II Tahun 2016

Kinerja Direktorat Komunikasi Publik

Capaian kinerja Direktorat Komunikasi Publik yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik secara keseluruhan mencapai target. Hanya saja capaian kinerja di Sasaran nomor 1 yakni Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik yang tidak mencapai target. Dari 5 target hanya tercapai 2 Kebijakan yakni Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Kendala-kendala yang dihadapi terkait kegagalan pencapaian target antara lain karena semangat deregulasi dan penyederhaan peraturan mengakibatkan 2 (dua) rancangan revisi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan peraturan tentang Tata Kelola Komunikasi Publik/SOP Government Public Relation (GPR) belum bisa terealisasi.

Adapun rincian capaian kinerja Direktorat Komunikasi Publik di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja	%
1	Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik	Jumlah Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik	5	2 PM Kominfo Permenkominfo nomor 13 Tahun 2016 dan Permenkominfo nomor 14 tahun 2016	40
2	Layanan pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik	Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi	300	369 pranata humas meningkat kapa- sitasnya melalui pelaksanaan Bimtek pengembangan SDM	123
		Jumlah SDM PPID Negara yang meningkat kemam- puannyadalam implementasi UU KIP"	250	209 PPID telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Informa- si dan Dokumentasi	83.6
		Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komu- nikasi publik"	150	167 aparatur SKPD Provinsi meningkat pemahamannya ttg tata kelola bidang IKP	111
3	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP	3500	Dialog Publik 6 x (peserta 1700 orang) Dialog TV 6 x Dialog Radio 39 x	100

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan dan penyediaan informasi, secara umum sudah baik ditandai dengan seluruh target telah mencapai 100%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja	%
1	Analisis isu publik di bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman	Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan	300	297 (Analisis Hasil Monitoring Isu Publik) 62 (Media Content Analysis)	120
		Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik	30	30 Dokumen Database K/L	100
2	Paket Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI	Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan kemasyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal)	15	15 Judul Buku (Termasuk produksi: 213 Infografis 169 Videografis sebagai diversifikasi konten)	100
		Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi	1	1 NSPK Monitoring Isu Publik	100

Kendala pencapaian kinerja di lingkup Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi adalah terutama dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang tidak maksimal dalam penetapannya. 1 (satu) dokumen NSPK Monitoring Isu Publik hanya ditetapkan dalam bentuk surat edaran Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik atas saran dari Biro Hukum Kemkominfo karena besarnya sudah termasuk dalam RPM Tata Kelola Komunikasi Publik/SOP GPR yang disusun oleh Direktorat Komunikasi Publik yang sampai dengan akhir tahun 2016 tidak juga diterapkan.

Hal itu perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya agar penyusunan regulasi dapat tuntas maksimal penetapannya sehingga sifatnya dapat mengikat dan diterapkan oleh stakeholder terkait.

Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik

Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang media publik secara umum sudah baik ditandai dengan 5 (lima) target telah mencapai bobot 100% dan hanya 1 (satu) tidak mencapai target. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja	%
1	Layanan Pengelolaan Media Publik	Jumlah Peserta Bimtek Media Publik	150	160 peserta bimtek di 3 Lokasi (Makassar, Surabaya, Batam)	106
		Jumlah Penyediaan sarana prasarana media center yang lengkap dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik.	25	100% terkirim di 25 lokasi	100
		Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia	18	12 Edisi Tabloid Komunika 3 Edisi Jurnal Dialog 12 Bulan Pengelolaan Web Infopublik 5 Tema Advetorial 5 Tema Media Luar Ruang 2 Pameran	216
2	Layanan Informasi Publik melalui media publik terkait Kampanye Revolusi Mental	Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan	1 Strakom Revolusi Mental	Draft SE Menkominfo ttg Strakom Revolusi Mental	80
		Jumlah audience Promosi, publikasi dan advokasi untuk menciptakan awareness/ berpartisipasi/ terkait revolusi mental	2000	Dialog Publik 10 kali (2000 audience) Petunra 7 lokasi (7000 audience) Dialog Interaktif TV 3 kali Dialog Interaktif Radio 1 Kali PSA 3 judul 3 Forum Diskusi Publik	450
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1	1 Dok Monev	100

Berdasarkan data pengukuran terhadap Direktorat Pengelolaan Media Publik, sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja dari 2 (dua) sasaran tahun 2016 telah mencapai bobot 100%, hanya 1 (satu) target yang tidak mencapai 100% yakni Pedoman/Strakom Revolusi Mental. Draft surat edaran tersebut belum di tanda tangani oleh Menkominfo. Saat ini draft tersebut masih ditelaah lebih lanjut.

Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi

Capaian kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah, secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai 100%. Hanya ada 3 (tiga) dari 7 target yang tidak mencapai 100%. Kendala pencapaian tersebut pada dasarnya karena adanya pengurangan volume target disesuaikan dengan revisi DIPA terkait penghematan anggaran negara di tahun 2016. Adapun rincian capaian Direktorat Kemitraan Komunikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja	%
1	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui lembaga mitra dalam rangka implementasi GPR (Government Public Relations)	Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan SKPD/OPD	30	110 SKPD/OPD mengunggah 32 tema narasi tunggal melalui kanal web-sitenya	360
2	Layanan Informasi K/L yang dikelola oleh Tenaga Humas Pemerintah dalam rangka implementasi GPR	Jumlah Konten yang tersusun Berdasarkan Narasi Tunggal	48	48 tema narasi tunggal	100
		Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Program Prioritas masing-masing K/L	40	49 Laporan	122
3	Lembaga Ormas, Lembaga Profesi, dan Lembaga Media yang diberdayakan	jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media	12	11 lembaga	91.6
		Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya	1000	800 peserta	80
		Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik	350	230 peserta bimtek	65
		Jumlah Peserta Bimtek Kelompok informasi masyarakat di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik	700	850 peserta bimtek	121

Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional

Capaian kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, dan kemitraan perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Secara umum sudah cukup baik ditandai dengan 2 (dua) indikator target telah mencapai 100%. Satu target lainnya hanya mencapai bobot 62% karena jumlah targetnya tidak tercapai karena disesuaikan dengan revisi DIPA terkait penghematan anggaran di tahun 2016. Adapun rincian capaiannya Direktorat Layanan Informasi Internasional adalah sebagai berikut:

Tabel 19.
Capaian Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja	%
1	Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis	Jumlah kemitraan layanan informasi dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing	6	6 kemitraan dengan/dalam: AMRI/SOMRI ASEAN (Asean Ministers Responsible for Information/Senior Officials Responsible for Information) ABU (Asian-Pacific Broadcasting Union) AIBD (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development) ASEAN COCI (Committee on Culture and Information) Kominfo Rusia ABU Prizes 2016	100
2	Layanan Penyebaran Konten Informasi Nasional dan Internasional	Jumlah publikasi konten isu strategis di media cetak dan elektronik berbahasa asing	7	7 publikasi konten	100
		Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah internasional.	800	Kegiatan Indonesia Update 2016 di Moskow Rusia yang diikuti oleh 500 peserta 17 Agustus 2016	62

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai bobot 100%. Ada satu target hanya mencapai nilai 80% karena hanya tersusun 4 dokumen dari target 5 dokumen yang direncanakan.

Tabel 20.
Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Kinerja	%
1	Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan	6	6 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi	5	5 dokumen	100
		Jumlah dokumen Peraturan Perundang-undangan	5	4 dokumen	80
		Jumlah dokumen kerjasama	5	4 dokumen	80
		Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya	4	4 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja	5	4 Dokumen	90
		Peningkatan Kapasitas Pegawai	1	1 dokumen laporan	100
		Pelaksanaan Ketatausahaan	1	1 dokumen laporan	100
2	Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	1	1 Dokumen Harmonisasi RUU Perlindungan Data Pribadi	100

Permasalahan utama pencapaian kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal IKP adalah adanya tidak tercapai seluruhnya. Oleh karena itu, penetapan target kedepannya perlu di perhitungkan dengan akurat agar dapat direalisasikan seluruhnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkup Eselon II Ditjen IKP sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Namun, pencapaian di lingkup Eselon II tersebut ternyata belum cukup mendukung (kurang berkorelasi) secara memuaskan terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I Ditjen IKP. Kondisi itu menandakan bahwa permasalahan yang perlu mendapat perhatian utama dalam Program Kerja Ditjen IKP berikutnya adalah adanya data IKK Eselon II yang kurang fokus mendukung IKU Eselon I Ditjen IKP.

Diagram 6. Korelasi Pengukuran Capaian IKU dan IKK di Lingkup Ditjen IKP

Satuan Kerja	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%	Perjanjian Kinerja Ditjen IKP	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%
Direktorat Komunikasi Publik	60 %	Perjanjian Kinerja Ditjen IKP	28, 57% (Hanya 2 dari target 7 yang meancapai 100%)
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	100 %		
Direktorat Pengelolaan Media Publik	83 %		
Direktorat Kemitraan Komunikasi	57 %		
Direktorat Layanan Informasi Internasional	66 %		
Sekretariat Ditjen IKP	66 %		

Penyebab Capaian Kinerja (IKU) Ditjen IKP tahun 2016 secara umum belum mencapai bobot 100% karena beberapa hal yakni (1) target dan realisasi belum selaras, (2) target yang ingin dicapai belum disepakati, (3) pengukuran tidak mewakili masyarakat yang dituju, (4) tidak dilakukan evaluasi, (5) adanya perbedaan pandangan atau pemahaman antara Ditjen IKP dengan stakeholders terkait terhadap beberapa indikator, dan (6) adanya penolakan dari stakeholders terkait.

Saran

Ditjen IKP perlu meninjau kembali (review) secara regular agar IKU dan IKK dapat lebih berkaitan (berkorelasi erat) sehingga capaian Program Ditjen IKP Tahun 2016 dapat mencapai target yang ditetapkan. Peninjauan kembali dilakukan terhadap Indikator Kinerja yang merujuk kepada RPJMN 2015-2019 maupun Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Direktif Menkominfo

Upaya peninjauan kembali tersebut perlu dibahas secara bersama-sama oleh Kemenkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan berbagai stakeholders terkait lain. Hal itu karena perbaikan IKU dan IKK akan mengubah Rencana Strategis Ditjen IKP yang tercantum dalam lampiran RPJMN 2015-2019.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan IKU dan IKK adalah seluruh IKU dan IKK dipastikan telah selaras dan setiap indikator tersebut dipastikan dapat diukur.

Untuk pengukuran IKU yang bersifat Outcome harus disusun dulu data dasar awal dan dirancang metodologi pengukurannya melalui survey komprehensif yang mewakili masyarakat yang menjadi sasaran diseminasi informasi public.

Referensi

Kementerian Kominfo. Peraturan Menkominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menkominfo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

"Corruption Perceptions Index 2014".<https://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>

Indo Barometer, (2015, Oktober 9) Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Data Survei Nasional 14-22 September 2012 dalam <http://indobarometer.com/publish/?p=survei>

"The Enigma of Indonesia" <http://www.edelman.com/post/the-enigma-of-indonesia/>

"2017 Edelman Trust Barometer - Indonesia" <https://www.slideshare.net/EdelmanAPAC/2017-edelman-trust-barometer-indonesia>

Footnotes

- 1 *Corruption Perceptions Index 2014: <https://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>*

Tabel 21.
Lampiran Laporan Realisasi Keuangan 2016

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI		SISA DANA		BLOKIR		SISA DANA SETELAH BLOKIR	
			RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
059.07.09	Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik									
3044	Direktorat Komunikasi Publik	9.284.430.000	7.684.017.674	82,76	1.600.412.326	17,24	1.499.055.000	16,15	101.357.326	1,09
3045	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	11.541.800.000	10.025.877.035	86,87	1.515.922.965	13,13	1.500.000.000	13,00	15.922.965	0,14
3046	Direktorat Pengelolaan Media Publik	28.034.041.000	25.104.768.665	89,55	2.929.272.335	10,45	2.545.320.000	9,08	389.952.335	1,37
3047	Direktorat Kemitraan Komunikasi	17.844.764.000	17.803.510.938	99,77	41.253.062	0,23	-	0,00	41.253.062	0,23
3048	Direktorat Layanan Informasi Internasional	7.959.600.000	6.908.020.591	86,79	1.051.579.409	13,21	1.000.000.000	12,56	51.579.409	0,65
3051	Sekretariat Ditjen IKP	71.970.558.000	66.506.010.276	92,41	5.464.547.724	7,59	1.450.000.000	2,01	4.014.547.724	5,58
	JUMLAH DITJEN IKP	146.635.193.000	134.031.205.179	91,41	12.602.987.8321	8,59	7.994.375.000	5,45	4.608.612.821	3,14

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

